



## BUPATI KARIMUN

KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA DAN JABATAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Karimun Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penunjukan dan Penetapan Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nama dan Jabatan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nama dan Jabatan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Noor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
13. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1044 Tahun 2019 tentang Upah Minimum Kabupaten Karimun Tahun 2020;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan peraturan bupati karimun nomor 57 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 2 tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN TENTANG PENETAPAN NAMA DAN JABATAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Nama dan Jabatan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perangkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Karimun pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Kontrak dengan nama dan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 4 Januari 2022





LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI KARIMUN  
 NOMOR 41 TAHUN 2022  
 PENETAPAN NAMA DAN JABATAN  
 KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAERAH DAN PERANGKAT SATUAN KERJA  
 PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022

NAMA DAN JABATAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN  
 PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
 KARIMUN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DI PPKD
1.	Dr. MUHD. FIRMANSYAH, M.Si NIP. 196869121989091002	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR PPKD
2.	Dr. ABDULLAH, S.Sos, M.Si NIP. 196903241993101001	KEPALA BPKAD	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	HERU SUNARJI, S.T., M.M NIP. 197309042002121009	SEKRETARIS BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
4.	GRANDY REGEL TUERAH, S.T.,M.E NIP. 197605082002121007	KABID. ANGGARAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
5.	FIRMAN ZULKHAIDI, S.I.P., M.A.P NIP. 197606052000121002	KABID. PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
6.	SUGENG, S.E.Ak., M.Ak NIP. 197610082002121008	KABID. AKUNTANSI BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
7.	AGUS ARFIANSYAH, S.Kom NIP. 197208012000121004	KABID. ASET DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

8.	HELGA JUNAIDI, S.I.P NIP. 198208222007012004	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
9.	LIDYA PARAMA S, SH, M. Mpub NIP. 197908042005022005	KASUBID PEMANFAATAN & PEMINDAH TANGANAN ASET DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
10.	SAWALUDDIN, S.I.P NIP. 198009092010011007	KASUBID. PENYUSUNAN ANGGARAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
11.	RAJA MARDIATY NURLINA, S.E., M.M NIP. 197503082000122006	KASUBID. PENGELOLAAN KAS BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
12.	SUWARTOYO, S.E., M.M. NIP. 197308312006041008	KASUBID. AKUNTANSI DAN PENGELUARAN KAS BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
13.	ROSITA, SE, M.Ak NIP. 197607172002122012	KASUBBAG. PERENCANAAN DAN EVALUASI BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
14.	MUHAMMAD SHAIFUN, STP NIP. 197803112008031001	KASUBID. ADMINISTRASI ANGGARAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
15.	WILIANA ASIA PUTRI, SE, AK, M.Ak, CA NIP. 198607112009042004	KASUBID. AKUNTANSI DAN PENERIMAAN KAS BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
16.	MUHAMMAD IBNU SUGANDA, S.STP NIP. 199401032015071001	KASUBID. EVALUASI ANGGARAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



17.	JOKO TRIWIBOWO, S.Sos, M.Ak NIP. 198201302008011005	KASUBID. PENATAUSAHAAN ASET DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
18.	HAFDALINA, S.E, M.Ak NIP. 197909142008032001	KASUBID. AKUNTANSI PELAPORAN BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
19.	RIDUAN SIHITE, S.I.Kom NIP. 197806032009011006	KASUBID. PELAYANAN PERBENDAHARAAN II BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
20.	DIANA YULIANTI, A.Md NIP. 198007062005022005	KASUBBAG. KEUANGAN DAN ASET BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
21.	KATRINA OCTORIANA, S.Kom NIP. 197910072009012009	KASUBID. PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGENDALIAN ASET DAERAH BPKAD	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
22.	RD RIEKE RESTY AFRIANY, SE NIP. 198604172009042004	ANALIS PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
23.	MAHENDRA EKA SUSANTO, S.IP NIP. 198212062009011008	BENDAHARA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
24.	TRIAPDI PRIHATINI, SE NIP. 198205052009042002	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
25.	FRIMMA SOESRIA DEWI, S.Sos NIP. 198107032007012011	ANALIS BADAN MILIK NEGARA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

26.	SYARIFAH SYITHA SUSANA, S.IP NIP. 198006022009012006	ANALIS ASET NEGARA	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
27.	BAMBANG SETIAWAN, SE NIP. 198504152010011006	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
28.	NENI TRIANA, A.Md NIP. 198304202008032003	PENGELOLA PENDAPATAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
29.	WILDA GUSTIANI, A.Md NIP. 198008282010012003	VERIFIKATOR KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
30.	FRANS WENNER S, A.Md NIP. 197605042008011019	PENGOLAH DATA PERENCANAAN PENGANGGARAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
31.	HENNY NOVITA, A.Md NIP. 197611232011012001	VERIFIKATOR KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
32.	NURHASANAH NIP. 198101222003122006	PENGADMINISTRASI PENERIMAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
33.	WIKA INDRIANI,SE NIP. 198405092019022004	ANALIS KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
34	JENNI, SE NIP. 198807022020122002	ANALIS MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



35.	DUDY KURNIAWAN NIP. 197609092003121011	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
36.	POPPY DEWI ANGGRAENI NIP. 197907292007012013	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
37.	YUSRIZAL NIP. 197507292007011013	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
38.	RONY KORNIWAN NIP. 197608052008011013	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
39.	DONNI RESYIKHANA NIP. 198301242007011007	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
40.	JUNAIDA NIP. 197505152009012005	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
41.	SUKENDRO NIP. 198005112007011004	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
42.	ABDUL HAFIZ	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
43.	ABDUL RAHIM, S.Kom	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

44.	AFRI ZULAYMI, S.Sos	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
45.	AHMAD FAZLI MARDIANSYAH, S.Tr	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
46.	ALJUFRI	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
47.	FHERDY FERNANDO	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
48.	GUSTINA	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
49.	HAJJAR NURMEIDHA	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
50.	HARFINA NOSTALFIANI	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
51.	KURATUL AINI, S.Si	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
52.	LEGY RAMADIA NINGSIH, S.Kom	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH



62.	RIYAN PUSPA, SE	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
63.	RUS TRAKI PRIMA, S.I.Kom	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
64.	SAPRIL	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
65.	STIYONO, S.IP	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
66.	SUHAEMI, S.Sos	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
67.	T. HEWINDRAYANDI, A.Md	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
68.	TENGGU DENI SAFPUTRA, SE	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
69.	THASSYA PREETY ISLIANA	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
70.	TRI RHENDRA ANUGRAH	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
71.	WIRAHADINATA INDRA PUTRA, ST, MM	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

72.	YULLIA DANİYANTI, S, A.Md	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
73.	ZULFIKAR	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
74.	DESZANA WILISANTI PUTRI, S.A.P	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
75.	JULI HASTUTI RETTOB	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
76.	RAJA ERNITA	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
77.	ADI PERMADI, SE	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
78.	JULYANDRI CHRISTIAN	TENAGA ADMINISTRASI	PERANGKAT SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI KARIMUN



AGNUR RAFIQ